

BAB 1

PENDAHULUAN

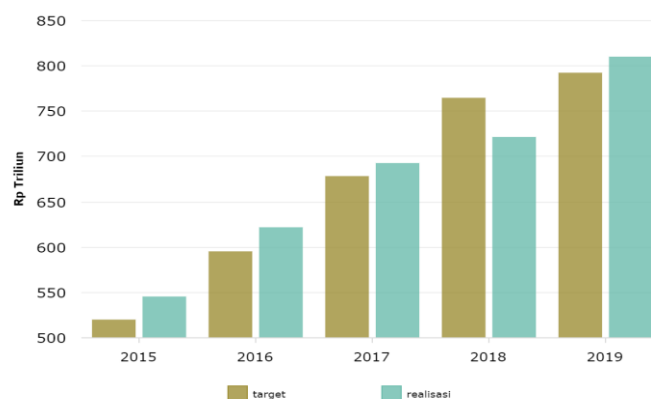
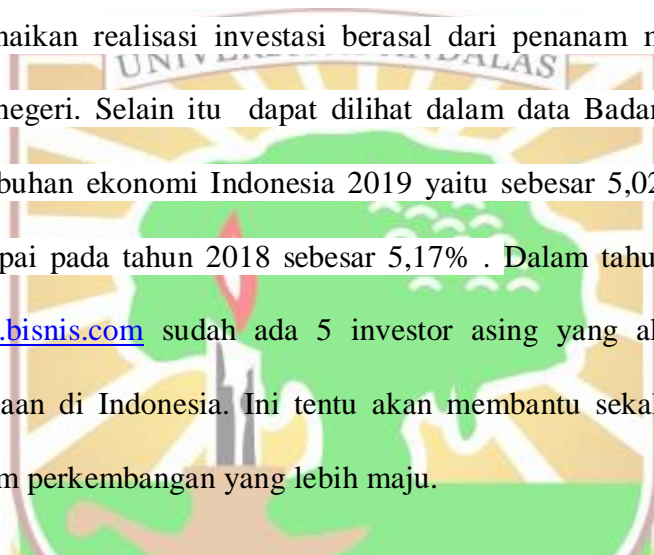
1.1 Latar Belakang

Perekonomian yang meningkat di Indonesia membuat persaingan sangat ketat. Persaingan yang ketat ini membuat perusahaan memikirkan cara agar dapat terus berkembang dan tidak tertinggal dengan pesaing mereka. Membenahi tata kelola perusahaan merupakan cara yang digunakan oleh perusahaan di Indonesia untuk mengikat para investor asing. Namun, pimpinan perusahaan Indonesia menanggapi bahwa sanya tata kelola itu sebagai hambatan yang wajib dipatuhi. Karena itu perusahaan tidak menganggap tata kelola sebagai peraturan untuk mencegah risiko dan bencana akan tetapi hanya formalitas semata yang mengeluarkan banyak biaya.

Praktik tata kelola perusahaan terbukti efektif dapat dilihat dari kemampuan meminimalkan modal, menurunkan risiko, dan mempengaruhi nilai kinerja perusahaan secara positif. Perusahaan menyesuaikan budaya perusahaan dan melengkapi peraturan untuk meminimalkan tata kelola yang ketat. Saat ini banyak perusahaan di Indonesia yang memulai berbernah tata kelola yang masih kurang baik demi menarik hati investor serta menumbuhkan daya saing. Setiap perusahaan berusaha untuk memperbaiki kekurangan internal maupun eksternal dikarenakan tuntutan pertumbuhan ekonomi global yang semakin meningkat. Namun dibalik itu mematuhi tata kelola perusahaan saja belum cukup untuk meningkatkan iklim investasi secara berkelanjutan. Kepercayaan internasional

dapat diraih dengan cara membatasi transaksi yang ketat agar dapat mengamankan investasi berkelanjutan menurut data dari The Indonesian Journal of Leadership, Policy, and World Affairs.

Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi Indonesia naik tahun 2019 sebesar 48,4% dalam 5 tahun. Ini menandakan bahwa sanya banyak investasi yang masuk ke perusahaan di Indonesia. Kenaikan realisasi investasi berasal dari penanam modal asing dan modal dalam negeri. Selain itu dapat dilihat dalam data Badan Pusat Statistik bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 yaitu sebesar 5,02% lebih rendah dari yang dicapai pada tahun 2018 sebesar 5,17% . Dalam tahun 2019 menurut www.ekonomi.bisnis.com sudah ada 5 investor asing yang akan berinvestasi dalam perusahaan di Indonesia. Ini tentu akan membantu sekali perusahaan di Indonesia dalam perkembangan yang lebih maju.



Gambar 1.1 Grafik Realisasi Investasi Indonesia

Sumber : katadata.co.id

Dengan meningkatnya investasi yang masuk ke Indonesia Kementerian Perindustrian bidik industri tumbuh sebesar 5.3% awal tahun 2020. Pemerintah semakin fokus dengan kinerja industry manufaktur karena sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

Menurut Anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Benny Soetrisno mengatakan pendanaan merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan industry manufaktur. Masalah yang dihadapi industri manufaktur ini karena adanya kecenderungan kredit bermasalah yang cukup tinggi yang disebabkan oleh terbatasnya modal yang ada di perbankan dengan begitu industry mulai cari pendanaan lainnya seperti investor asing. Kendala pendanaan dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan ketika terjadinya kendala-kendala pendanaan yang ada (Rinofah, 2018). Li et al.,(2015) kendala pendanaan dapat juga terjadi karena ketidaksempurnaan pasar modal dan asimetris informasi. Perusahaan menghadapi ambang batas yang lebih tinggi dan mengalami kesulitan yang lebih besar dalam memperoleh dukungan pembiayaan dari bank atau investor melalui cara formal. Lingkungan kelembagaan seperti itu mengharuskan perusahaan itu mengadopsi cara-cara informal untuk mendapatkan sumber pembiayaan yang diperlukan. Dalam hal memberikan kondisi dan informasi yang valid mengenai perusahaan diperlukan tata kelola perusahaan dalam menginformasi ke investor agar tidak terjadinya asimetris informasi.

Selain itu pendanaan juga dapat berasal dari pemerintahan yang terjadi ketika perusahaan melakukan hubungan kerja yang saling menguntungkan seperti kegiatan CSR. Hubungan ini membuat perusahaan bertukar sumber daya dengan

pemerintah dan membentuk obligasi pemerintah-perusahaan serta saling menguntungkan karena memungkinkan pemerintah mencapai tujuan sosial dan politiknya, dan memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah mengakses sumber daya pemerintah dan memperoleh keuangan yang sesuai dukungan (Shen et al., 2014). Hubungan antara CSR dan bank menemukan bahwa kreditor menganggap perusahaan yang memenuhi tanggung jawab sosial memiliki risiko yang lebih rendah dengan demikian, kreditor bersedia memberikan pinjaman bunga rendah pada perusahaan ini. (Goss & Roberts, 2011). Dengan seperti ini CSR dapat membantu dalam menuju proses *green governance structure*.

Hal ini juga berkaitan dengan investasi berkelanjutan atau dinamakan investasi hijau. Menurut *Principle Responsible for Investment (PRI)*, pemilik aset keuangan sudah mulai mengontrol dananya sebesar US\$89 triliun dan 1900 pengelola mulai berkomitmen serta mengadopsi prinsip-prinsip keberlanjutan dan ESG dalam pengelolaan portofolio. Selain itu pada negara maju investasi hijau berkembang dengan pesat dilihat dari aset investasi berkelanjutan tumbuh menjadi 30,7 triliun dollar AS didapatkan dari survey Global Sustainable Investment Alliance (GSIA). Di Indonesia dapat dilihat investasi hijau dari saham hijau yang dimiliki perusahaan pada SRI-KEHATI indeks yang mana dapat dilihat bagaimana saham hijau tersebut. Investasi berkelanjutan mencakup lingkungan, social dan tata kelola yang baik (ESG) untuk menjaga keberlanjutan perekonomian dan kehidupan di planet bumi sehingga perusahaan tidak hanya dilihat dari CSR saja tapi juga dilihat dari perusahaan yang mengadopsi dan

mengintegrasikan kepedulian itu pada model bisnis dan praktik operasionalnya (www.kehati.or.id).

Kepedulian secara global pada lingkungan dan sosial membuat industry jasa keuangan termasuk sektor perbankan memperhatikan lagi dampak lingkungan dan sosial dari investasi dan pinjaman yang diberikan untuk membiayai pembangunan dan industri. Ini menyebabkan terjadinya penurunan pada kualitas lingkungan dan sosial akibat dari pembiayaan bank terhadap aktivitas pembangunan dan industri tersebut. Oleh karena itu dibutuhkanlah *Green governance structure* sebagai pembangunan berkelanjutan yang dilakukan dalam tatanan ekonomi, social dan lingkungan. Dalam hal ini *green governance* berkesinambungan dengan *corporate social responsibility* sebuah perusahaan karena dari sinilah investor dapat mengetahui gambaran perusahaan tersebut. Strategi tata kelola hijau sepenuhnya mencerminkan penekanan perusahaan pada kesinambungan jangka panjang dalam hal CSR, sementara pengaturan organisasi tata kelola hijau dan pengenalan karyawan atau sumber daya manusia yang ada dilatih dalam masalah lingkungan dan keberlanjutan mencerminkan inisiatif aktif perusahaan menuju CSR kesadaran (Li et al., 2020).

Selain itu investor dan bank juga mulai menganggap kinerja lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kriteria investasi penting. Perusahaan akan mengungkapkan laporan tanggung jawab social maupun laporan keberlanjutan secara sadar atau terbuka ketika perusahaan itu memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap masalah lingkungan. Pengungkapan CSR bersifat sukarela karena belum adanya standar pengungkapan lingkungan (Janah &

Handayani, 2020). Pengungkapan CSR berpengaruh negative terhadap *financing constraints* dan menunjukkan bahwa pengaruh akan lebih jelas ketika perusahaan menghadapi kendala keuangan yang lebih kuat (Liu et al., 2019). Ini menjadi pertimbangan oleh perusahaan dan para investor dalam memutuskan investasi.

Selain itu keterbukaan informasi CSR ini juga berkaitan dengan *financial transparency* dimana informasi yang terbuka dan jelas akan membantu perusahaan dalam memperoleh dana karena investor melihat bagaimana keadaan perusahaan. *Financial transparency* dapat menjadi jembatan antara pengungkapan CSR dengan *financing constraints* dilihat dari penelitian sebelumnya bahwa transparansi keuangan perusahaan rendah, pengungkapan berkualitas tinggi sehingga laporan tanggung jawab sosial dapat menyampaikan informasi nonkeuangan tambahan ke pasar dan juga mengurangi asimetri informasi (D. S. Dhaliwal et al., 2012).

Perusahaan tidak berhubungan secara homogen dengan dampak CSR terhadap kendala keuangan. Oleh karena itu, investor dapat mengidentifikasi siklus hidup perusahaan dan mempertimbangkannya saat membuat keputusan untuk meminimalkan risiko investasi mereka. Banyak perusahaan memenuhi tanggung jawab sosial demi reputasi yang lebih baik dan biaya pendanaan yang lebih rendah, yang secara langsung dapat meningkatkan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Zhao & Xiao, 2018).

Kepemilikan institusional juga menjadi salah satu perhitungan dalam memilih investasi karena para investor institusi memiliki preferensi hijau. Investor

institusi lebih suka menahan perusahaan yang saham hijau dari pada perusahaan yang saham tercemar. Karena menurut mereka perusahaan yang hijau itu sangat berkesinambungan dan terkait dengan CSR. Kadang kala preferensi hijau dari investor institusi menjadi tolak ukur tersendiri bagi mereka (Martin & Moser, 2016). Institusional investor memiliki kemampuan penambangan informasi yang lebih kuat (Li dan Lu, 2015), mereka lebih termotivasi menggali informasi tata kelola hijau secara mendalam dan menyebarkan citra yang bertanggung jawab secara sosial untuk perusahaan tempat mereka memegang rasio kepemilikan saham yang tinggi.

Tingkat keseimbangan ekuitas digunakan sebagai variable moderasi dalam penelitian ini karena variabel ini dapat memperkuat dampak negatifnya tata kelola hijau pada kendala pendanaan. Keseimbangan ekuitas tidak hanya memfasilitasi penanaman hijau gagasan tata kelola ke dalam tujuan dan strategi perusahaan, tetapi juga memengaruhi tata kelola hijau pengaturan struktur, sehingga meningkatkan tingkat struktur tata kelola hijau perusahaan dan mengurangi kendala pembiayaan (Li et al., 2020).

Praktik CSR di Indonesia menguat dengan aturan mengenai PT yang usahanya menggunakan sumber daya alam wajib menjalankan CSR tertera dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 1 poin 3. (Sukenti et al., 2015). Dengan begitu dipilihlah perusahaan sektor manufaktur yang bisnisnya secara langsung bersentuhan dengan sumber daya alam. Perusahaan yang diambil dengan kriteria adanya pengungkapan CSR dalam buku laporan tahunan yang tercatat di BEI periode 2015 sampai 2019.

Program CSR dapat mendukung perusahaan untuk melakukan tata kelola hijau dan menggambarkan kondisi perusahaan kepada para investor ataupun pemerintahan sehingga tidak terjadinya kendala pendanaan. Apalagi perusahaan sektor manufaktur yang limbah ataupun polusi yang disebabkan oleh pengolahan produknya. Dengan adanya program CSR ini maka perusahaan dapat meningkatkan kepedulian sosialnya terhadap lingkungan sekitar.

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, maka penulis masih melihat ketidakkonsistenan hasil penelitian antara hubungan *green governance structure* terhadap *corporate financing constraints*. Untuk itu, penulis tertarik mengambil judul **“Pengaruh *Green Governance Structure* terhadap *Corporate Financing Constraints* dengan Tingkat Keseimbangan Ekuitas dan *Financial Transparency* sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikembangkan, maka penulis merumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana pengaruh *green governance structure* terhadap *corporate financing constraints* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh investasi keberlanjutan terhadap *corporate financing constraints* pada perusahaan sector manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

3. Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate financing constraints* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
4. Bagaimana pengaruh pengungkapan CSR terhadap *corporate financing constraints* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
5. Bagaimana pengaruh *green governance structure* terhadap *corporate financing constraints* dengan tingkat keseimbangan ekuitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
6. Bagaimana pengaruh *financial transparency* terhadap hubungan pengungkapan CSR dan *corporate financing constraints* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengaruh *green governance structure* terhadap *corporate financing constraints* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
2. Mengetahui pengaruh investasi keberlanjutan terhadap *corporate financing constraints* pada perusahaan sector manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?

3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *corporate financing constraints* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019?
4. Mengetahui pengaruh pengungkapan CSR terhadap *corporate financing constrains* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
5. Mengetahui pengaruh *green governance structure* terhadap *corporate financing constrains* dengan tingkat keseimbangan ekuitas sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?
6. Mengetahui pengaruh *financial transparency* terhadap hubungan pengungkapan CSR dan *corporate financing constrains* pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2019 ?

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menyampaikan informasi mengenai *green governance structure*, pengungkapan CSR, *finansial transparency*, kepemilikan institusional dan *corporate financing structure*, terutama bagaimana pengaruh diantara sama lainnya.
2. Manfaat Empiris

- Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya mengenai *corporate governance*, khususnya penelitian yang menyangkut *green governance structur* dan *corporate financing constrain*.
- Sebagai bahan informasi serta masukan untuk pihak-pihak yang membutuhkan solusi permasalahan kendala pendanaan perusahaan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di BEI, dengan periode observasi tahun 2015 sampai 2019. Penelitian ini akan mengamati dan menguji pengaruh *Green Governance Structure* terhadap *corporate financing constraints*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan urutan atau metode dalam pembuatan sebuah penelitian atau riset dengan penjelasan secara rinci, padat dan jelas. Penulisan ini akan disajikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan penulis membahas mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dilakukan, manfaat penelitian serta ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini membahas mengenai teori-teori dasar yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas. Selain itu pada penelitian ini juga terdapat penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan metode apa yang digunakan dalam penelitian serta bagaimana ukuran teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan dan menguraikan hasil analisis dalam penggunaan metode pada bab 3 yang telah dilakukan. Data yang telah didapatkan akan dibahas pada bab ini dan dikaitkan dengan permasalahan yang ditelusuri.

BAB V : PENUTUP

Bagian bab ini menyimpulkan hasil penelitian yang didapatkan dari bab sebelumnya serta menjelaskan bagaimana implementasi penelitian ini serta saran untuk penelitian selanjutnya.

